

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *19:53:57 WIB*



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. **N a m a** : **Airlangga Hartarto**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962

Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001,
Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta 11480

NIK : 3174070110620004

2. **N a m a** : **Lodewijk F. Paulus**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 27 Juni 1956

Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

NIK : 3175042707570006

Bedasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKAN NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personaliala Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 08111997019, Email:

basten2612@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai..... TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Barat 3. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Yang Diumumkan Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD dan DPRD terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari. Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22.19 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT, DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT 3 (TIGA) SEPANJANG MENGENAI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERINDO SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan **Papua Barat 3** adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

NO	NAMA PARNAS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019	2.019	
2	PARTAI GERINDRA	1.591	1.591	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279	5.279	
4	PARTAI GOLKAR	11.971	11.982	-11
5	PARTAI NASDEM	4.459	4.459	
6	PARTAI BURUH	669	669	
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736	736	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	509	509	
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107	107	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236	1.236	
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110	110	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947	2.947	
13	PARTAI BULAN BINTANG	125	125	
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111	1.111	
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463	1.463	
16	PARTAI PERINDO	4.761	3.989	+772
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974	4.974	
24	PARTAI UMMAT	169	169	

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara Partai PERINDO sebanyak 772 suara pada 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar dan Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara pada Distrik Weriagar dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara pada Distrik Weriagar

NO	NAMA PARNAS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	385	396	-11
16	PARTAI PERINDO	537	89	+448

Table 3. Persandingan Perolehan Suara Pada Distrik Fafurwar

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PARTAI GOLKAR	98	98	
16	PARTAI PERINDO	373	49	+324

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Weriagar sebanyak **11 suara** dan penambahan suara Partai PERINDO pada Distrik Weriagar sebanyak **448 suara**, serta penambahan suara partai PERINDO pada Distrik Fafurwar sebanyak **324 suara** dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:
- 3.1 Perolehan suara Partai PERINDO pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir C. Hasil dan formulir C. Hasil Salinan sebanyak **89 suara** dengan rincian sebagai berikut:
- a. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar sebanyak **43 suara [bukti P.1-1b]**;
 - b. TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar Induk sebanyak **7 suara [bukti P.1-1c]**;
 - c. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru sebanyak **5 suara [bukti P.1-1d]**;
 - d. TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanakin sebanyak **8 suara [bukti P.1-1e]**;
 - e. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara sebanyak **10 suara [bukti P.1-1f]**;
 - f. TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak **7 suara [bukti P.1-1g]**;
 - g. TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak **9 suara [bukti P.1-1h]**.
- 3.2 Perolehan suara Partai PERINDO pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.8 Lembar 2 [bukti P.1-1i] bertambah **448 suara** menjadi **537 suara**;
- 3.3 Perolehan suara Pemohon pada Distrik Weriagar berdasarkan formulir C. Hasil Salinan sebanyak **396 suara** dengan rincian sebagai berikut:
- a. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar sebanyak **53 suara [bukti P.1-1j]**;
 - b. TPS 02 Kelurahan/Desa Weriagar Induk sebanyak **50 suara [bukti P.1-1k]**;
 - c. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Baru sebanyak **49 suara [bukti P.1-1l]**;
 - d. TPS 01 Kelurahan/Desa Tuanakin sebanyak **10 suara [bukti P.1-1m]**;
 - e. TPS 01 Kelurahan/Desa Weriagar Utara sebanyak **83 suara [bukti P.1-1n]**;
 - f. TPS 01 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak **110 suara [bukti P.1-1o]**;
 - g. TPS 02 Kelurahan/Desa Mogotira sebanyak **43 suara [bukti P.1-1p]**.
- 3.4 Perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.3 Lembar 2 [bukti P.1-1i] berkurang **11 suara** menjadi **385 suara**;
- 3.5 Perolehan suara Partai PERINDO pada 5 TPS Distrik Fafurwar sebanyak **50 suara** akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir model D. HASIL KABKO-DPRPB HALAMAN 2-2.8 Lembar 1 [bukti P.1-1i] secara sadar dan sengaja Termohon menambah

perolehan suara Partai PERINDO sebanyak **323 suara** sehingga perolehan suara Partai PERINDO yang semestinya **50 suara** berubah menjadi **373 suara**.

4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai PERINDO telah merugikan perolehan suara Pemohon dan perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk Pengisian Jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dan tidak terdapat penambahan suara Partai PERINDO sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh kursi ke-1 dan ke-5 pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk pengisian jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Papua Barat 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 3 sebagai berikut:

NO	NAMA PARPOL	PEMOHON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.019
2	PARTAI GERINDERA	1.591
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.279
4	PARTAI GOLKAR	11.982
5	PARTAI NASDEM	4.459
6	PARTAI BURUH	669
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	736
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	509
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	107
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.236

NO	NAMA PARPOL	PEMOHON
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	110
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.947
13	PARTAI BULAN BINTANG	125
14	PARTAI DEMOKRAT	1.111
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.463
16	PARTAI PERINDO	3.989
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.974
24	PARTAI UMMAT	169

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.-----

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



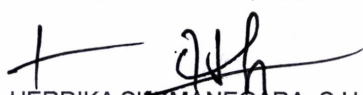
MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



HERU ANDESKA, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



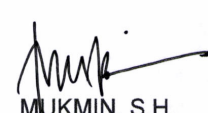
GUNTUR SETIAWAN, S.H.



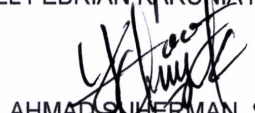
AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



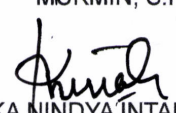
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




RISKA NINDYA INTANI, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



AKBAR M ZAIMURI, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.




ALBERTHUS, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.